

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA SEBONGKUH, KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
EMILIANUS EVIL
NIM. E42010016

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

email: evilbrumet@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini berjudul implementasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan. Permasalahan mengenai implementasi PNPM-MP yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti, mengingat kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan masih belum dapat sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis pendekatan deskriptif dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan masyarakat untuk menerima, memahaminya dan melaksanakan program tersebut, sehingga sering terjadi salah pemahaman dan penafsiran dalam pelaksanaan program di lapangan. Di samping itu masyarakat masih menganggap bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan anggaran bantuan kepada masyarakat. Kemudian pelaksana atau pelaku program masih sulit terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Karena pelaku program masih kurang dan lemahnya pengendalian kegiatan oleh pelaku program di tingkat desa. Sehingga untuk menumbuh-kembangkan dengan mengedepankan peran, swadaya, partisipasi aktif serta pemberdayaan masyarakat akan menjadi kendala dan masyarakat sulit untuk dilakukan. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan, agar implementasi PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata-kata kunci: Implementasi, PNPM Mandiri Perdesaan, Pengorganisasian, Interpretasi, Aplikasi.

Abstract

This thesis titled program implementation National Rural Community Empowerment in Rural Sebongkuh subdistricts Kembayan Sanggau. This study is intended to provide an understanding on the implementation of the National Program for Community Empowerment (PNPM) Sebongkuh the District Rural Village Kembayan. Problems concerning the implementation of PNPM-MP is happening is quite interesting to study, given the policy of PNPM Mandiri program still can not be fully understood by the community in its implementation. The method used in this study with this type of approach descriptive and qualitative data processing techniques. The results showed that there were difficulties masi people to accept, understand and implement the program, so it often goes wrong in exercising their understanding and interpretation program in the field. In addition, people still think that PNPM Mandiri is budgetary assistance to the community. Then the executor or the perpetrator is still difficult programs involved in the implementation of PNPM Rural. Because offender program is still lacking and weak control of activity by the offender programs at the village level. So as to grow and develop with the advanced role, self-help, participation and empowerment will be obstacles and difficult for people to do. Through the writing of this also meant, that the implementation of PNPM Mandiri Rural Village Sebongkuh good views of the organization, interpretation and application can be realized in accordance with the expectations of society.

Keywords: Implementation, PNPM Rural, Organizing, Interpretation, Application.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipercaya, aspiratif (usulan), representatif (nyata) dan akuntabel (pertanggungjawaban) dengan sasaran untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat, tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM), Program Penanggulangan Kemiskinan PJM sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan. Terbentuknya Forum BKM tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten untuk mengawal terwujudnya berbagai program daerah serta terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/kabupaten dalam PNPM Mandiri Perdesaan sesuai kondisi fiskal daerah.

Desa Sebongkuh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kembayan yang telah menjalankan PNPM-MP ini, adapun program yang telah berjalan di Desa Sebongkuh terbagi 2 (dua) jenis,

yaitu pertama program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri, salah satu program yang telah berjalan yaitu Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kedua pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan jembatan namun walaupun sudah ada program PNPM selama 2 (dua) tahun tetapi, tingkat perekonomian masyarakatnya masih rendah.

Identifikasi masalah mengenai implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan menunjukkan bahwa:

- a. Pelaksanaan program tingkat desa, masih terlihat kurangnya transparansi dan pekerjaan dilakukan hanya sekedar selesai atau asal jadi tanpa memrehatikan kualitas dan kuantitas kegiatan yang dilakukan khususnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Jalan yang seharusnya diaspal dengan jarak 2 (dua) km dalam kurun waktu penyelesaian 3 (tiga) bulan, belum terlaksana dengan maksimal, kenyataan dilapangan hanya teralisasi sekitar 1,5 km saja.
- b. Masih kurang dan lemahnya pengendalian kegiatan PMPN Mandiri Perdesaan secara kualitas, misalnya

pelaksanaan proyek pembangunan jembatan yang dilakukan di Desa Sebongkuh terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu jembatan gantung dan jembatan beton. Jembatan gantung yang dibuat dengan panjang 50 meter berhasil dilakukan, tetapi untuk proyek jembatan beton gagal dilaksanakan, karena baru 1 (satu) bulan kondisi jalan sudah berlubang.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perdesaan yang berkaitan dengan pelaksanaan infrastruktur ternyata gagal dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Sebongkuh. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan hanya berorientasi pada pemenuhan target dan tidak memikirkan proses peningkatan kebutuhan masyarakat desa.

2. Rumusan Permasalahan

Mengacu kepada permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, sebagai suatu kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini yang konsisten dengan kajian mengenai permasalahan yang dihadapi, maka

selanjutnya dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

3. Tujuan Penelitian

Mendiskripsikan proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasi/penerapan.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, umumnya bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan khususnya bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan terutama mengenai implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa

Sebondok Kecamatan Kembayan
Kabupaten Sanggau.

aktivitas utama dalam implementasi
kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu:

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Meter dan Horn dalam Winarno, (2004:21), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan atau yang disebut *self-implementation*. Kebanyakan kebijakan memerlukan proses implementasi yang panjang rumit dan sulit.

Menurut pandangan Jones (2004:296), agar implementasi kebijakan dapat sukses dilaksanakan, maka terdapat 3 (tiga)

a. Organisasi, yaitu setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas

b. Interpretasi, yaitu mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

c. Aplikasi/penerapan, yaitu peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk melihat itu harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Berdasarkan yang dikemukakan Jones mengenai 3 (tiga) aktivitas implementasi kebijakan, sebagai bentuk suatu persyaratan yang harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan, karena kekuranglengkapan salah satu syarat akan berpengaruh pada hasil implementasi suatu kebijakan. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksanaan kebijakan yang mencakup

pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Implementasi PNPM

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:789) diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo (2003: 89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. Sementara itu menurut Jones (2006: 25) program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. Selanjutnya Munir (2002:11) menyatakan bahwa program sendiri terdiri dari berbagai macam, program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam :

a. Ruang lingkup. Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat

dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.

- b. Ukuran (*Size*). Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.
- c. Durasi. Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.
- d. Kejelasan dan spesifikasi program input. Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.
- e. Kompleksitas tujuan. Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.
- f. Kebaruan program. Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Tujuan dari suatu program pada umumnya adalah pertumbuhan ekonomi. Karena suatu program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi akan

memperbesar produktivitas dan alokasi sumberdaya yang lebih baik. Program harus dirancang untuk menjamin penggunaan sumber daya yang ada akan menghasilkan output yang tinggi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkapkan masalah implementasi PNPM-PM, dengan indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Informan dalam penelitian ini yaitu: masyarakat yang diberdayakan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Sebanyak 10 orang. Sedangkan informan kunci terdiri dari: Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan sebanyak 2 orang, Camat Kembayan dan Kepala Desa Sebongkuh. Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara kepada Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan, bahwa secara organisasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah sudah terorganisir sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti Fasilitator, Kordes, Pemda dan lain-lain. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh diawali dengan kegiatan keorganisasian dengan melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait perdesaan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan perdesaan. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan program dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai program pembangunan yang difokuskan kepada upaya percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas. Kemudian hasil wawancara kepada Camat Kembayan bahwa pelaksanaan program

PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Desa Sebondok telah dimulai sejak tahun 2012 dan aktivitas lapangan atau rangkaian kegiatan program siklus 1 tahun 2012 merupakan tahun pertama masuknya PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Desa Sebondok. Siklus 1 tahun pertama berjalan selama 1 tahun mulai dari bulan Januari – Desember. Siklus 1 PNPM Mandiri Perdesaan dengan kegiatan merupakan sosialisasi awal, rebug kesiapan masyarakat (RKM), refleksi kemiskinan (RK), Pemetaan swadaya (PS), pembentukan BKM, penyusunan Perencanaan Jangka Menengah (PJM)/ rencana tahunan program penanggulangan kemiskinan (Renta Pronangkis), dan yang terakhir adalah pengorganisasian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Siklus 2 dilaksanakan pada tahun 2013 diawali dengan serangkaian kegiatan meninjau ulang kinerja kelembagaan BKM beserta kegiatan yang telah dilakukan pada siklus 1 pada pertengahan tahun 2013 program telah menyelenggarakan kegiatan musyawarah pendanaan siklus satu dengan hasil ditetapkan sejumlah usulan untuk didanai.

2. Interpretasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, bahwa interpretasi atau

pemahaman masyarakat desa terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan masih rendah. Cara yang dilakukan agar masyarakat mudah memahami program tersebut, dilakukan dengan cara mensosialisasikan program tersebut, baik mengenai pendanaan dan persiapan awal tahap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebondok, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebondok yang sudah berjalan secara optimal, efektif dan efisien dan bahkan telah sampai pada akhir siklus ke 3 (tiga). Namun masih ada kendala yang terjadi, yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat melalui kehadiran dalam rangka kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dimulai dari musyawarah sosialisasi desa, musyawarah RW/RT, identifikasi masalah dan penggalan gagasan, musyawarah masyarakat penetapan kebutuhan, musyawarah perangkaan, musyawarah desa, penetapan alokasi dana kegiatan dan musyawarah desa pendanaan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan desa Sebondok, menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam mensosialisasikan program PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat yaitu keterbatasan pengetahuan, dalam

menginformasikan materi PNPM Mandiri Perdesaan dan mengenai mekanisme program, koordinasi para pelaku, dan rendahnya SDM dalam pemahaman program PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Aplikasi

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dengan tujuan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di daerah Perdesaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sosial. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Prakteknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara melalui masyarakat yang diberdayakan, menyatakan bahwa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan alokasi program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan alat untuk mempercepat proses kemandirian masyarakat yang ada di Desa Sebongkuh,

agar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan dapat belajar menangani kegiatan pembangunan secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun daerahnya. Untuk itu sudah seharusnya seluruh kegiatan yang didanai melalui program PNPM Mandiri Perdesaan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh warga secara luas sehingga dana yang diturunkan akan mempunyai nilai guna dan bermanfaat bagi warga.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disinyalir bahwa kemandirian masyarakat di setiap desa termasuk Desa Sebongkuh adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang. Sehingga membangun kemandirian masyarakat secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan masyarakat yang terjadi selama ini. Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalahnya, kalau bisa didorong secara luas di seluruh daerah, maka kreativitas dan ketahanan masyarakat akan menjadi modal penting menghadapi tantangan global di masa depan. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dimungkinkan karena mereka mendapatkan akses partisipasi. Partisipasi

menjadi bukan sekedar hak tetapi juga tanggungjawab sehingga membuahkan kerjasama yang tinggi antara Pemerintah Desa, BKM dan masyarakatnya.

Hasil wawancara kepada Camat Kembayan mengenai keterlibatan masyarakat Desa di Desa Sebongkuh, melalui badan yang ada yaitu BKM, Sekretariat, UP, KSM menyatakan bahwa pemerintah Desa Sebongkuh sudah berusaha untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, artinya untuk prinsip partisipatif ini, pemerintah desa mengajak badan permusyawaratan untuk bermusyawarah bersama. Sebelum diadakan musyawarah bersama di tingkat Desa, untuk penentuan kebutuhan, prioritas dan harapan warga masyarakat di Desa Sebongkuh diadakan musyawarah di tingkat RW dan RT kemudian dilanjutkan pada musyawarah tingkat lingkungan. Pada prinsipnya prosedur tersebut telah memperhatikan aspirasi warga masyarakat di Desa Sebongkuh.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa proses

Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan pembangunan di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya:

1. Pengorganisasian program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan BKM dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di Desa Sebongkuh, seperti pembangunan jalan desa dan jembatan.
2. Kemampuan interpretasi BKM desa dalam mensosialisasikan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh belum optimal. Hal tersebut terlihat dari pemahaman masyarakat mengenai program tergolong rendah dan tingkat partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik, khususnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Sehingga pelaksanaan program pembangunan fisik tersebut belum terlaksana dengan maksimal, kenyataan di lapangan hanya teralisasi hanya sebagian saja.
3. Aplikasi program PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya

memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di Desa Sebongkuh. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang masih terlihat kurang lancar, karena masih terjadinya keterlambatan dalam penyerapan dana. Kemudian realisasi pencairan dana dilakukan secara bertahap dengan sistem pencairan dana kegiatan 50 % tahap pertama, dan 50 % tahap kedua dengan catatan bahwa seluruh administrasi pelaporan penggunaan anggaran keuangan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai dan 50 % tahap kedua dengan catatan bahwa seluruh administrasi pelaporan penggunaan anggaran keuangan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai.

E. SARAN

Memperhatikan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan diperlukan penyikapan dari semua pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka melakukan pengorganisasian Program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebongkuh, sedapat mungkin pihak-pihak yang terlibat melakukan penyusunan program PNPM Mandiri Perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, seperti melakukan tindakan mempercepat pemulihan dan kebutuhan pelayanan sosial, baik di bidang pembangunan desa.
2. Dalam rangka meningkatkan interpretasi atau pemahaman masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan, maka fasilitator program perlu melakukan sosialisasi bersama-sama dengan pihak BKM desa, agar dengan melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama mengenai kehadiran dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, dalam rangka musyawarah sosialisasi desa dan kecamatan, penetapan alokasi dana kegiatan dan musyawarah pendanaan. Di samping itu, cara lain untuk melakukan sosialisasi yaitu melalui media massa (media cetak dan media elektronik), papan pengumuman dan baleho.

3. Dalam rangka meningkatkan aplikasi program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sebangkuh, maka pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seperti UPK dan BKM dapat menjalankan perenannya dengan baik sesuai dengan ketentuan program dan dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai hasil keputusan musyawarah desa dan memfasilitasi proses musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen Pemerintah:

Kepmenko Bid. Kesra No.
25/Kep/Menko/Kesra/VII/3007 tentang
Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan

Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor;
157/BPM.PD.P dan KB-B/2014, tentang
Pembentukan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sanggau

F. FERENSI

Literatur

Adi, I. R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moenir, A.S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EMILIANUS EVIL
NIM / Periode lulus : E42010016 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : evilbrumet@gmail.com / 082154349696

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA SEBONGKUH, KECAMATAN
KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Persepsi/Disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 18 Juli 2017

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

(Emilianus Evil)

